



PERAN DINAS PEINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN DALAM MENINGKATKAN USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Adrian^{1*}

***Korespondensi :**

Email :

muhammadadrian606@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 30 Juni 2025

Revisi : 22 Agustus 2025

Diterima : 26 Agustus 2025

Diterbitkan : 30 Agustus 2025

Kata Kunci :

UMKM, Industri Kreatif,
Kolaborasi, Digitalisasi

Keyword :

MSMEs, Creative Industries,
Collaboration, Digitalization

Abstrak

UMKM Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Bukittinggi memiliki potensi besar secara akademis. Tak diragukan lagi, mereka memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pengembang industri masa depan dan wirausahawan yang imajinatif dan kreatif. Namun, mereka dapat menghadapi kesulitan yang signifikan jika pemerintah tidak sepenuhnya mendukung dan memajukan mereka. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab untuk mendukung UMKM. Langkah-langkah berikut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM di Bukittinggi : 1) Memberikan pelatihan bagi UMKM; 2) Mendidik masyarakat tentang upaya kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak; 3) Memantau pengembangan UMKM; 4) Membimbing pengembangan UMKM ke arah yang lebih berkelanjutan; 5) Berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur pendukung; dan 6) Mendorong persaingan yang sehat di antara para pedagang. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia Bukittinggi.

Indonesian MSME play a vital role in economic growth at both the national and regional levels. Bukittinggi boasts significant academic potential. They undoubtedly have the capacity to develop into future industrial developers and imaginative and creative entrepreneurs. However, they can face significant challenges if the government does not fully support and advance them. The Ministry of Industry and Trade is responsible for supporting SMEs. The following steps demonstrate the government's commitment to strengthening SMEs in Bukittinggi: 1) Providing training for SMEs; 2) Educating the public about mutually beneficial cooperative efforts; 3) Monitoring SME development; 4) Guiding SME development toward a more sustainable direction; 5) Participating in the provision of supporting infrastructure; and 6) Encouraging healthy competition among traders. This aims to promote the development and well-being of Bukittinggi's human resources.

PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di Kota Bukittinggi, merupakan salah satu fokus utama dalam upaya memperkuat perekonomian nasional dan daerah (Soegesty, Fahmi, & Novianti, 2020). UMKM tidak hanya berperan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal (Subarkah & Rachman, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor ini

melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM (Iswardono, 1994).

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan pendanaan. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses modal usaha karena berbagai faktor, seperti kurangnya jaminan, prosedur perbankan yang rumit, dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan (Jamaludin, Miftahurrahmah, & Muizzudin, 2023). Kondisi ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan berinovasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses, seperti kredit mikro, pembiayaan berbasis syariah, dan program bantuan modal usaha. Selain itu, pendampingan dan edukasi keuangan juga sangat penting agar pelaku UMKM dapat mengelola keuangan dengan baik dan meningkatkan kredibilitas mereka di mata lembaga keuangan (Alfin, 2018).

Selain masalah pendanaan, keterbatasan keahlian manajerial juga menjadi hambatan signifikan bagi UMKM (Asyari, 2014). Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola bisnis, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya manusia, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan (Kotler & Keller, 2009). Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi operasional dan daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas manajerial dan kewirausahaan. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan praktisi bisnis yang berpengalaman (Murtadlo & Hanan, 2018).

Kapasitas pemasaran juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak UMKM yang masih bergantung pada pasar lokal dengan jaringan pemasaran yang terbatas, sehingga sulit untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan platform e-commerce menjadi solusi efektif untuk memperluas akses pasar UMKM. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintensifkan program literasi digital dan pelatihan pemasaran online, serta menyediakan akses internet yang cepat dan terjangkau di daerah-daerah, termasuk di Bukittinggi. Dengan demikian, UMKM dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional.

Pengembangan produk yang inovatif dan berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM (Halim, 2022). Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki nilai tambah. Dukungan

dalam bentuk riset pasar, teknologi produksi, dan sertifikasi produk, seperti sertifikasi halal dan standar mutu lainnya, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara UMKM dengan institusi pendidikan, lembaga riset, dan pusat inovasi juga dapat mempercepat proses inovasi dan pengembangan produk (Amalia, Wati, Putri, & Mairiza, 2023).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal juga tidak boleh diabaikan dalam pengembangan UMKM (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Pemerintah harus memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pemberian akses modal yang memadai. Pendekatan inklusif ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat basis ekonomi lokal. Di Bukittinggi, misalnya, pengembangan UMKM berbasis sumber daya alam lokal dan kearifan budaya setempat dapat menjadi potensi besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam memberikan panduan, pelatihan, dan fasilitasi bagi UMKM. Melalui program-program yang terintegrasi, kementerian dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, hingga pemasaran dan akses pembiayaan. Selain itu, pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengembangan UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat dan komitmen bersama, UMKM dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang berfokus pada peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Dewi et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena isu peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka statistik, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan, implementasi program, serta pengalaman langsung para pelaku usaha. Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi dengan unit analisis berupa program Disperindag, pengalaman pelaku IKM dari berbagai subsektor, serta interaksi antara pemerintah, mitra, dan komunitas usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disperindag, pelaku IKM, pendamping program, mitra pasar, serta lembaga pembiayaan, disertai

observasi kegiatan pelatihan, pameran, dan pelayanan perizinan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kegiatan (Putri, 2020).

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses pengkodean terbuka, aksial, dan selektif untuk menemukan pola, kategori, dan tema utama terkait regulasi, fasilitasi, akses pasar, pembiayaan, serta jejaring kolaborasi. Kredibilitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sementara transferabilitas diperkuat dengan deskripsi kontekstual ekosistem IKM Bukittinggi yang dikenal dinamis. Dependabilitas dan konfirmabilitas dijaga dengan audit trail, catatan reflektif, serta pemisahan data mentah dari interpretasi peneliti. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang kaya dan komprehensif mengenai peran strategis Disperindag dalam mendukung daya saing IKM, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi perbaikan berbasis pengalaman nyata pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Bagi UMKM Indonesia

Pembangunan ekonomi merupakan proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Skousen (2009) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai upaya menurunkan biaya hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengintegrasikan pelaku usaha berpotensi tinggi ke dalam tatanan sosial-ekonomi (Sulastiningsih & Urfiyya, 2019). Dalam konteks Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi motor penting pembangunan ekonomi karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat struktur ekonomi nasional (Tambunan, 2019).

Kuncoro (2018) menegaskan bahwa partisipasi dunia usaha dalam pengembangan UMKM tidak hanya menyumbang pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Dengan kata lain, UMKM di Indonesia bukan sekadar penyangga ekonomi rakyat, melainkan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Handrian & Andry, 2020). Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, sekaligus berkontribusi signifikan pada ekspor nonmigas. Namun, di balik potensi tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural yang perlu diurai.

1. Akses Modal dan Pembiayaan

Salah satu tantangan klasik UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan formal. Ketidadaan agunan, riwayat kredit yang tidak memadai, serta prosedur birokrasi yang berbelit menjadi penghalang utama (Beck & Demirguc-Kunt, 2006). Akibatnya, banyak UMKM terjebak pada sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi, yang justru melemahkan kapasitas pengembangan usaha.

Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berupaya mengurangi hambatan ini, namun efektivitasnya masih terbatas terutama di sektor mikro. Dalam kerangka kebijakan inklusi keuangan, inovasi pembiayaan berbasis syariah dan teknologi finansial (*fintech*) dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong aksesibilitas modal (Djawahir, 2018).

2. Keterbatasan Akses Pasar

Selain permodalan, persoalan distribusi dan pemasaran juga menjadi isu utama. Produk UMKM sering kali kalah bersaing dengan produk impor maupun produksi skala besar karena keterbatasan informasi pasar, branding, dan digitalisasi pemasaran (Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2014). Pemanfaatan *e-commerce* memang menawarkan peluang, tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki literasi digital yang memadai. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan platform digital menjadi penting dalam membuka akses pasar yang lebih luas (Putranto et al., 2019).

3. Kualitas Produk dan Inovasi

Kualitas produk merupakan faktor penentu daya saing. Namun, keterbatasan teknologi, riset pasar, dan sumber daya manusia terampil membatasi kemampuan inovasi UMKM. Sertifikasi halal, organik, atau ISO misalnya, masih menjadi tantangan bagi sebagian besar pelaku usaha karena keterbatasan biaya dan akses informasi. Padahal, standar kualitas merupakan prasyarat masuknya produk ke pasar global (OECD, 2017). Kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi perlu diperkuat untuk mendorong inovasi berbasis riset dan pengembangan (R&D) (Warto & Samsuri, 2020).

4. Transformasi Digital dan Teknologi

Revolusi industri 4.0 telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Namun, ketimpangan digital masih menjadi masalah serius, terutama bagi UMKM di daerah tertinggal. Menurut World Bank (2022), kesenjangan akses internet dan literasi digital berpotensi memperlebar ketimpangan antara UMKM yang mampu bertransformasi dengan yang tertinggal. Intervensi pemerintah dalam bentuk literasi digital massal dan pembangunan infrastruktur TIK menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan ini (Indayani & Sumarnik, 2019).

5. Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Hambatan birokrasi, proses perizinan yang panjang, serta kompleksitas pajak menjadi faktor yang mengurangi daya saing UMKM. Reformasi regulasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian insentif fiskal, serta penguatan perlindungan hukum bagi UMKM merupakan agenda mendesak (Kemenperin, 2022).

6. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi titik lemah utama. Minimnya keterampilan manajerial, pemasaran, dan teknologi menghambat inovasi serta efisiensi usaha (Suryana, 2020). Oleh karena itu, program pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata UMKM perlu diperluas (Ferrinadewi, 2008).

Tantangan UMKM di Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, kultural, hingga teknologi. Namun, apabila tantangan ini dapat diatasi melalui sinergi kebijakan, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, UMKM berpotensi menjadi katalis utama pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Widodo, Saputri, & Intania, 2022).

Peran Dinas Peindustrian Dan Perdagangan

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperin) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi memegang peran strategis dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat, adaptif, dan kompetitif. Misi yang dirumuskan tidak hanya menysasar aspek peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mencakup kolaborasi, pengawasan, pemberdayaan, promosi, serta penciptaan iklim persaingan yang sehat.

Secara konseptual, kebijakan Kemenperin dapat dianalisis melalui pendekatan triple helix, yakni sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Pendekatan ini menekankan pentingnya inovasi berbasis kolaborasi dalam memperkuat daya saing UMKM (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Dengan adanya pendampingan teknis, pelatihan manajemen mutu, serta dukungan peralatan modern, UMKM Bukittinggi diharapkan mampu meningkatkan standar produksi hingga setara dengan pasar nasional dan internasional.

Pemerintah daerah mendorong terbentuknya jejaring usaha kolektif seperti koperasi dan asosiasi dagang yang memungkinkan UMKM memiliki posisi tawar lebih kuat di pasar. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk memperluas akses bahan baku dan teknologi, tetapi juga menciptakan efisiensi distribusi dan promosi.

Pemerintah juga menekankan strategi promosi dan branding produk lokal melalui pameran, pelatihan pemasaran digital, serta fasilitasi sertifikasi produk. Upaya ini diharapkan mampu membuka pasar ekspor baru sekaligus meningkatkan reputasi produk UMKM Bukittinggi. Lebih jauh, misi Kemenperin dalam mencegah praktik monopoli dan menciptakan persaingan sehat juga merupakan langkah penting untuk menjaga dinamika pasar tetap kondusif bagi pelaku usaha kecil. Implikasi dari implementasi kebijakan ini sangat signifikan. Peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global atau

fluktuasi harga komoditas. Dengan kata lain, UMKM menjadi instrumen strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal sekaligus menyumbang pada stabilitas makroekonomi nasional.

Pengembangan UMKM di Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi, sebagai salah satu pusat perdagangan dan pariwisata utama di Sumatera Barat, memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian regional (Asyari, 2014). Dengan latar belakang sejarah sebagai kota dagang sejak era kolonial, Bukittinggi hingga kini tetap menjadi simpul penting bagi distribusi barang dan jasa di Sumatera. Dalam konteks modern, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menciptakan perekonomian yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan (Harbit, 2022).

Pengembangan UMKM di Bukittinggi tidak semata dimaknai sebagai strategi peningkatan ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pelestarian budaya lokal (Abubakar, 2016). Produk-produk UMKM Bukittinggi—mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga industri kreatif—tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sarat dengan identitas budaya Minangkabau. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM di Bukittinggi berlandaskan pada visi ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

1. Meningkatkan Kesejahteraan dengan Memperhatikan Lingkungan

Pemerintah Kota Bukittinggi menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan UMKM tidak boleh menghasilkan eksternalitas negatif berupa polusi, kerusakan ekosistem, atau penurunan kualitas hidup masyarakat. Pelaku usaha diarahkan untuk menggunakan teknologi produksi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah, dan bahan baku berkelanjutan. Sebagai contoh, beberapa UMKM pengolahan makanan telah mengadopsi kemasan biodegradable untuk mengurangi sampah plastik. Langkah ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada poin produksi dan konsumsi berkelanjutan (Franco-Riquelme & Rubalcaba, 2021). Dengan pendekatan ini, pengembangan UMKM di Bukittinggi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Hal ini penting mengingat pariwisata Bukittinggi sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan daya tarik alamnya (Putra, Fadilla, Ismail, Lutfi, & Rofiki, 2024).

2. Memperkuat Struktur Ekonomi dan Nilai Tambah Industri

Pemerintah Bukittinggi juga menekankan pentingnya nilai tambah dalam pengembangan UMKM. Produk-produk berbasis sumber daya lokal didorong untuk tidak hanya dipasarkan dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah menjadi barang bernilai tinggi. Misalnya, hasil pertanian lokal dapat diolah menjadi produk

olahan makanan khas seperti rendang kemasan, keripik sanjai, atau minuman herbal.

Diversifikasi produk juga menjadi strategi utama. Dengan adanya variasi produk, UMKM tidak hanya bergantung pada satu jenis barang, tetapi dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) yang memiliki ciri khas kultural dan potensi ekspor. Untuk memperkuat struktur ekonomi lokal, infrastruktur pendukung seperti pusat industri kecil, pasar modern, dan pusat distribusi juga dibangun. Infrastruktur ini memungkinkan UMKM mengakses pasar dengan lebih efisien, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing.

3. Pemberdayaan Masyarakat Kurang Beruntung

Salah satu aspek penting dari strategi pengembangan UMKM di Bukittinggi adalah pemberdayaan kelompok masyarakat kurang beruntung, termasuk pengrajin dan pelaku usaha mikro. Kelompok ini sering kali menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, serta keterampilan manajemen. Pemerintah memberikan perhatian khusus melalui program pelatihan, bantuan modal, dan fasilitasi akses pasar. Misalnya, kelompok pengrajin bordir tradisional di Bukittinggi diberikan pelatihan desain kontemporer agar produk mereka dapat menyesuaikan selera pasar modern tanpa kehilangan identitas budaya (Iswanaji, Nafi' Hasbi, Salekhah, & Amin, 2021).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama. Model ini memungkinkan pelaku usaha kecil memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar, sekaligus meningkatkan solidaritas sosial antar pelaku UMKM. Dengan pendekatan inklusif ini, pengembangan UMKM di Bukittinggi berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.

4. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Industri

Untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, pemerintah Bukittinggi membangun pusat-pusat pertumbuhan industri. Pusat ini berfungsi sebagai konsentrasi kegiatan produksi, inovasi, dan distribusi produk UMKM. Dengan adanya fasilitas pelatihan, akses permodalan, dan teknologi modern, pusat industri ini menjadi katalis bagi peningkatan efisiensi dan inovasi.

Selain sebagai ruang produksi, pusat pertumbuhan industri juga menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan. Dengan sinergi tersebut, tercipta ekosistem inovasi yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan. Model ini sesuai dengan kerangka *quadruple helix*, di mana peran masyarakat sipil juga dilibatkan dalam proses inovasi dan pembangunan ekonomi (Carayannis & Campbell, 2009).

5. Mendorong Inovasi dan Digitalisasi

Di era globalisasi, inovasi dan digitalisasi menjadi faktor penentu daya saing UMKM. Pemerintah Bukittinggi aktif mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Program pelatihan digital marketing, e-commerce, dan manajemen bisnis berbasis teknologi menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM.

UMKM kuliner, misalnya, kini banyak yang memasarkan produk mereka melalui platform marketplace nasional seperti Tokopedia dan Shopee, bahkan hingga ekspor lewat *e-commerce* lintas negara (Bennett, Schuhbauer, Skerritt, & Ebrahim, 2021). Langkah ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi. Pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi produk, baik sertifikasi halal, BPOM, maupun standar mutu internasional. Sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas (Warto & Samsuri, 2020).

6. Dampak Sosial dan Ekonomi

Implementasi strategi pengembangan UMKM di Bukittinggi telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Dari sisi ekonomi, peningkatan kapasitas UMKM mendorong pertumbuhan PDB daerah dan penciptaan lapangan kerja baru. UMKM kuliner dan kerajinan, misalnya, telah menyerap ribuan tenaga kerja, terutama perempuan dan kelompok usia produktif.

Dari sisi sosial, pemberdayaan masyarakat kurang beruntung membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program pelatihan dan bantuan modal memberikan peluang bagi pengrajin kecil untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, integrasi aspek lingkungan dalam pengembangan UMKM juga meningkatkan kesadaran ekologis di kalangan pelaku usaha. Dengan praktik produksi ramah lingkungan, UMKM Bukittinggi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas hidup masyarakat (Harbit, 2022).

Tantangan ke Depan

Meskipun terdapat capaian positif, pengembangan UMKM di Bukittinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah menghambat perluasan e-commerce. Kedua, resistensi sebagian pelaku usaha terhadap inovasi dan perubahan masih cukup tinggi. Ketiga, akses terhadap pasar global masih terbatas karena kendala bahasa, regulasi, dan logistik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga internasional juga harus diperkuat untuk mempercepat transfer teknologi dan memperluas jaringan pasar. Bukittinggi memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perdagangan di Sumatera Barat, sehingga pengembangan UMKM di daerah ini memiliki nilai strategis tidak hanya secara lokal, tetapi juga regional.

Pemerintah Kota telah merumuskan sejumlah tujuan strategis, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, hingga pembangunan pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pemerintah Bukittinggi menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Pelaku UMKM didorong untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, misalnya teknologi hemat energi, pengolahan limbah, dan penggunaan bahan baku berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengenai pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung—terutama pengrajin dan pelaku usaha mikro—merupakan strategi inklusif yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Program pelatihan, bantuan modal, dan penguatan koperasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas mereka. Pembangunan pusat pertumbuhan industri juga menjadi agenda strategis untuk menciptakan konsentrasi ekonomi yang efisien. Dengan infrastruktur pendukung yang memadai, pusat industri ini dapat menjadi katalis inovasi, transfer teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Inovasi dan digitalisasi menjadi pilar penting pengembangan UMKM Bukittinggi. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi dan platform digital sebagai sarana perluasan pasar dan peningkatan efisiensi. Penerapan standar kualitas serta sertifikasi produk dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global. Implikasi dari strategi ini adalah terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. UMKM Bukittinggi diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi dinamika pasar global, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berbasis inovasi, kemandirian, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Pengembangan UMKM di Bukittinggi mencerminkan sebuah paradigma pembangunan yang multidimensional. Orientasinya tidak hanya tertuju pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah berupaya menciptakan keseimbangan antara produktivitas usaha dengan pemberdayaan masyarakat rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sekadar dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, perhatian terhadap praktik usaha ramah lingkungan menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat bagi kesejahteraan jangka panjang. Lebih jauh, strategi yang dijalankan Bukittinggi berpotensi menjadi model pembangunan UMKM yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Dengan menggabungkan inovasi teknologi, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kolaborasi lintas pemangku

kepentingan, kota ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus bersandar pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Jika konsistensi kebijakan dan komitmen kolektif terus dijaga, Bukittinggi tidak hanya akan memperkuat perekonomian daerahnya, tetapi juga tampil sebagai rujukan nasional tentang bagaimana UMKM dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang adaptif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fauzi. (2016). Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanuri Maulod pada Masyarakat Aceh. *AKADEMIKA*, 21(01), 20.
- Alfin, Aidil. (2018). KONSEP JAMINAN SOSIAL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Analisis Terhadap Istilah Takāful al-Ijtīmā'ī, Damān al-Ijtīmā'ī dan Ta'min al-Ijtīmā'ī). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 15–33.
- Amalia, Nala, Wati, Rahma, Putri, Berliana, & Mairiza, Diany. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 142–156. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>
- Armstrong, Gary, Adam, Stewart, Denize, Sara, & Kotler, Philip. (2014). *Principles of marketing*. Pearson Australia.
- Asyari, Asyari. (2014). *KEWIRAUSAHAAN Membangun Jiwa Entrepreneurship Dengan Pendekatan Ajaran Islam*. STAIN Bukittinggi.
- Bennett, Nathan J., Schuhbauer, Anna, Skeritt, Daniel, & Ebrahim, Naazia. (2021). Socio-economic monitoring and evaluation in fisheries. *Fisheries Research*, 239, 105934. <https://doi.org/10.1016/J.FISHRES.2021.105934>
- Dewi, Ni Putu Sinta, Hidayat, Faisal, Doriza, Shinta, Budi, Yusuf, Santosa, Prasetya, Azzarah, Marshanda Anta, Suradi, Agustinus, Fadjarajani, Siti, Ariyani, Rika, & Krisdiyanto, Krisdiyanto. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Djawahir, Abdillah Ubaidi. (2018). Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value Pada Fintech Syariah Di Indonesia: Perspektif SOR (Stimulus-Organism-Response) Model. *2nd Annual Conference For Muslim Scholars*, (April 2018), 439–448.
- Ferrinadewi, Erna. (2008). Pengaruh threat emotion konsumen dan brand trust pada keputusan pembelian produk susu Anlene di Surabaya. *Jurnal Kewirausahaan*, 1(2), pp-1.
- Franco-Riquelme, José Nicanor, & Rubalcaba, Luis. (2021). Innovation and sdgs through social media analysis: Messages from fintech firms. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/joitmc7030165>
- Halim, Muh Rizal. (2022). *Strategi Pengembangan dan Penguatan Inkubator Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. (1), 20–24.
- Handrian, Eko, & Andry, Hendry. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu*

- Administrasi Publik*, 6(1), 77–87.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Harbit, Auratul Atifah. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Balikpapan*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Indayani, Lilik, & Sumarnik. (2019). Manajemen perubahan. In *Manajemen perubahan*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-70-6>
- Iswanaji, Chaidir, Nafi' Hasbi, M. Zidny, Salekhah, Fitri, & Amin, Mohammad. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Iwardono, S. P. (1994). *Teori Ekonomi Mikro*. Gunadarma.
- Jamaludin, Nur, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, & Muizzudin, Muizzudin. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Kotler, Philip, & Keller, Kevin Lane. (2009). *Manajemen pemasaran*. edisi.
- Maturbongs, Edoardus E., & Lekatompessy, Ransta L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Sumber*, 81, 59.
- Murtadlo, Kholid, & Hanan. (2018). Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Supply Chain Management Terhadap Kinerja UKM dan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 5(1), 15–27.
- Putra, Muhammad Deni, Fadilla, Siti, Ismail, Dailani, Lutfi, Muhammad, & Rofiki, Akhmad. (2024). Ekonomi Hijau dan Prinsip Syariah: Bagaimana Media Mengkomunikasikan Keberlanjutan dalam Islam. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(3).
- Putranto, Fajar Febrian, Fitriani, Zhikry, Nugroho, Bramantyo Adi, Santi, Eka Nor, Wahyuningsih, Noor, Budiman, Puput Wahyu, & Purnomo, Adi Hendro. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Samarinda. *Riset Inossa* |, 1(13), 13–27.
- Putri, Hesi Eka. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Soegesty, Nugraha Bagoes, Fahmi, Idqan, & Novianti, Tanti. (2020). Kajian Faktor Yang Memengaruhi Adopsi Sistem Pijaman Peer To Peer Lending. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(1), 59–79.
<https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.1.4>
- Subarkah, Ridho, & Rachman, Junita Budi. (2018). Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development

- Goals. *Konferensi Nasional Ilmu ...*, (March), 1–6.
- Sulastiningsih, Sulastiningsih, & Urfiyya, Khalida. (2019). ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL DAN ADOPSI PSAK 109 TERHADAP KINERJA OPZIS DIY MELALUI METODE BALANCE SCORECARD. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 27(1), 25–45.
- Warto, Warto, & Samsuri, Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Widodo, Rochmad, Saputri, Nabilah, & Intania, Nova. (2022). STRATEGI REKRUTMEN SDM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PENDIDIKAN TERINTEGRASI PONDOK PESANTREN MAHASINA DARUL QUR'AN WAL HADITS (MTS DAN MA). *Jurnal Kependidikan Islam*, 12(2), 171–181. <https://doi.org/0.15642/jkpi.2022.12.2.171-181>
-

Copyright holder:

Muhammad Adrian (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

